

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : Provinsi Jawa Tengah

Halaman 5

“Anda Tidak Bayar, Kami Akan Mengejar”

Tunggakan PKB Rp 730 Miliar

SEMARANG - Anda tidak bayar, kami akan kejar! Itulah credo Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala BPPD Jateng Ihwan Sudrajat mengungkapkan hal tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor” di kantor intansi itu, kemarin. Acara digelar BPPD dan *Suara Merdeka*, dipandu Direktur Eksekutif Budi Santoso Foundation (BSF) Adi Ekopriyono.

Sebelumnya, kegiatan serupa diselenggarakan di Surakarta, Magelang, Pekalongan, Pati, dan Purwokerto. Peserta aktif terdiri atas pengusaha, LSM, akademisi, dan wartawan.

“Tahun 2017 tahun terakhir pemutihan. Setelah itu, tidak lagi ada pemutihan,” tegas Ihwan.

Pihaknya sudah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan pendapatan dari PKB, namun jumlah tunggakan masih besar, yakni Rp 730 miliar. Tunggakan PKB se-Jateng tahun lalu Rp 600 miliar dan 2018 Rp 130 miliar; Rp 30 miliar tung-

gakan di wilayah Kota Semarang.

Langkah-langkah yang akan diintensifkan, lanjut dia, antara lain memperluas *outlet* PKB, terutama di wilayah pedesaan; penerapan teknologi informasi, yaitu aplikasi “Sakpole” atau pembayaran secara *online*, dan mengingatkan wajib pajak agar tidak terlambat bayar PKB. “Selain itu, razia bersama kepolisian, advertorial atau iklan di media, serta mulai menerapkan sanksi,” jelas dia.

Bisa Menilang

Kepolisian, menurut dia, bisa menilang pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membayar PKB. Dasar pertimbangannya adalah STNK yang digunakan tidak sah, belum mendapatkan pengesahan dari kepolisian karena belum membayar PKB.

PKB, kata dia, merupakan sumber utama PAD, yaitu 36% dari seluruh PAD Rp 12 triliun. Tercatat, 68% pemilik kendaraan bermotor di Jateng patuh membayar PKB, sedangkan 32% tidak patuh. Dari yang tidak patuh, 53% karena lupa, 11% sibuk, 20% tidak punya uang, 16% alasan lain atau tidak peduli.

Peserta aktif FGD terdiri atas Harjanto Halim (Direktur Utama

PT Ulam Tiba Halim), Hastaning Sakti (Dekan Fakultas Psikologi Undip), Ribut Musprihadi (Yayasan Insan Mandiri Cerdas), Amaz Agung Andrasmara, Mahar, dan Fuad (Kadin Kota Semarang); serta Ernie Firmianti dan V Dewantoro (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia - P3I Jateng). Mereka memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidangnya.

Harjanto Halim mengusulkan agar BPPD mengadakan undian berhadiah, misalnya sepeda motor, untuk menarik tunggakan

Rp 730 miliar.

“Hadiah seribu sepeda motor seharga Rp 15 juta (per unit) saja, bisa dilakukan. Kita bagi hadiah senilai Rp 15 miliar, tapi kita raih Rp 730 miliar,” papar dia.

Ngargono, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng memberikan masukan, yaitu jual beli kendaraan bermotor difasilitasi pemerintah. Transaksi diambil alih pemerintah; balik nama dipermudah, digratiskan, sehingga orang beli kendaraan langsung STNK atas namanya. (C19-17)